



LAPORAN MONEV PENGLOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

**Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

TRIWULAN KE-III TAHUN 2022



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan III tahun 2022.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepada *Stakeholder* yang berkaitan dengan hasil monitoring yang ditemui pada Triwulan ke-tiga agar segera ditindaklanjuti.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 20 Oktober 2022
Wakil Ketua,


NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.
NIP. 197612042001122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
BAB II MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Pelaksanaan Monitoring di PTUN Serang	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring	3
C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik	3
1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat	4
2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta	5
3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala	6
4. Informasi Yang Dikecualikikan	10
BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID	20
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah disampaikan.

Mendukung upaya keterbukaan informasi publik Mahkamah Agung RI telah menelurkan regulasi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang bertujuan untuk lebih mengkonkritkan peraturan serupa yang telah diluncurkan sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakatan terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

MONITORING PENGELOAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sesuai dengan peraturan terbaru yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi bila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, diharapkan adanya teknologi informasi yang mudah diakses,

dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <https://ptun-serang.go.id/>.

1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan <ul style="list-style-type: none"> - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT 	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html
<ul style="list-style-type: none"> - Buku Register Perkara - Tahapan Penanganan Perkara 	https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Perkara 	https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2022
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan <ul style="list-style-type: none"> - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai - Statistik penjatuhan hukuman disiplin - Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman 	https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin
<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Majelis Kehormatan Hakim 	
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, 	http://jdih.ptun-serang.go.id/

Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua – Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung – Hasil Penelitian yang dilakukan	
4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan – Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan – Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	https://ppid.ptun-serang.go.id/
– Profil Hakim dan Pegawai	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/hakim
– Data Statistik Kepegawaian	https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian

2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

Daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Sosialisasi komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menyediakan pelayanan yang prima dan berkualitas tanpa adanya suap dan gratifikasi	https://ptun-serang.go.id/article/pelayanan-berkualitas-tanpa-gratifikasi
2. Pengumuman Memperingati Hari Untuk Tahu Sedunia (<i>Right to know day</i>)	<i>Berupa tampilan pop-up yang masa berlakunya disetting selama 3 hari kerja.</i>



STOP GRATIFIKASI

Pelayanan berkualitas tanpa suap dan gratifikasi.

#berAKHLAK bangga melayani bangsa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terus berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dengan menyediakan pelayanan yang prima dan berkualitas tanpa adanya suap dan gratifikasi.

Mari dukung penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang telah diberikan.

#PTUSerang

Pedoman Gugatan

- Syarat Gugatan
- Cerah Form Gugatan

Pendaftaran Perkara

- Pendaftaran Perkara
- Infografi C-Court Mahkamah Agung RI

Informasi Cepit

- Publikasi Ralat Perkara
- Direktori Putusan RIH
- Informasi Pendaftaran Perkara
- Statistik Perkara
- Pelayanan Pengadilan
- Informasi Kasei & PK
- Pengadilan
- SIRAS Mahkamah Agung RI
- Survey Pelayanan Pengadilan

Survey IKM Dan IPAK

- Survey IKM
- Survey IPAK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km. 5 Kel. Banjarsari, Kec. Serang Kota Serang, Banten 40132
Tlp.: (0264) 214085 Email: serang@ptun.org

HARI HAK UNTUK TAHU SEDUNIA

RIGHT TO KNOW DAY (RKTD)

"AKSES INFORMASI TANPA KETERBATASAN"
28 SEPTEMBER 2022

Memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia

Selanjutnya

LAYANAN PTSP ONLINE

Gambar: Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta

3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Link Tautan
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan	https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala
Sejarah Pengadilan	
Profil Ketua	
Profil Pegawai	
Struktur Organisasi	
Statistik Pengadilan	
Wilayah Yurisdiksi	
Visi dan misi	
Tugas pokok dan fungsi	
Kegiatan pengadilan	
Survey Pelayanan Publik	
2. Pelayanan dasar Pengadilan	
Standar pelayanan Pengadilan	
SOP Penerimaan Gugatan	
Alur Pemeriksaan Persiapan	
Biaya perkara	
Jam kerja pelayanan publik	
Tata tertib persidangan	
Jadwal persidangan	
3. Informasi Terkait Hak Masyarakat	
Prosedur pemberian layanan hukum	

	Prodeo
	Laporan pelaksanaan Prodeo
	Posbakum
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum
	Prosedur Permohonan informasi
	Prosedur Keberatan informasi
	Formulir Permohonan informasi
	Formulir keberatan informasi
	Tim pelaksana penanganan informasi
	Pedoman Pengaduan
	Prosedur Pengaduan
	Hak Pelapor dan Terlapor
	Formulir Pengaduan
4. Sistem Informasi Perkara	
	Penelusuran perkara
	Direktori putusan
	Statistik perkara
5. Pengumuman	
	Lelang barang dan jasa secara elektronik
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah
	Pengumuman lelang
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa
6. Laporan Kinerja Pengadilan	
	SAKIP
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
	CALK
	PKT
	RKT
	IKU
	RAK
7. Laporan Perkara	
	Laporan jenis perkara
	Laporan keadaan perkara

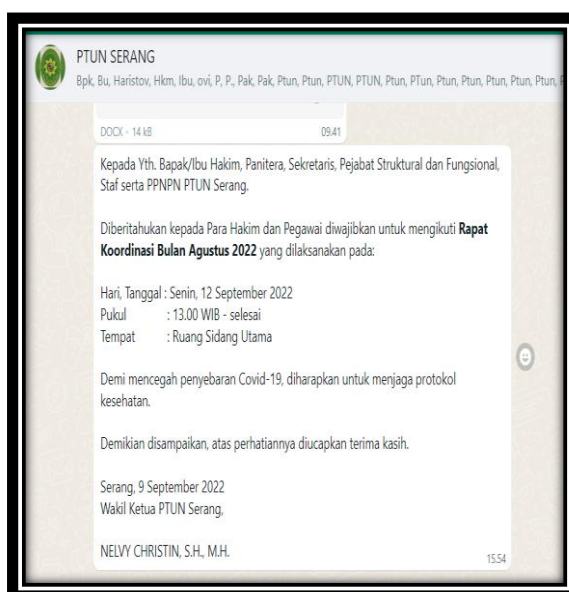
	Laporan keuangan perkara	
8.	Tranparansi keuangan	
	Laporan Anggaran DIPA	
	Laporan Realisasi Anggaran	
	Laporan PNBP	
	Statistik Keuangan	
9.	Transparansi aset	
	Laporan BMN	
	Sarana dan prasarana	
10	Transparansi kepegawaian	
	Persyaratan usul menjadi PNS	
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	
	Persyaratan pengajuan ASKES	
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	
	Persyaratan pengajuan pensiun	
	Hukuman disiplin	
11	LHKPN/LHKASN	
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan III ini mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya seremoni yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik.

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

- a) Publikasi kegiatan pada Website
- b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial (*Instagram dan Facebook*)
- c) Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparaturnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa media sosial Whatsapp dan Instagram. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.



Gambar: Publikasi harian melalui media *Whatsapp* dan *Instagram*

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana

dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *adviesblad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

BAB III

EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh menggambarkan semakin baiknya pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu sampai dengan Triwulan ke-III Tahun 2022.

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	2	Facebook	1	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	6-10 hari
2	Feb	1	Facebook	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas	-
3	Mar	1	e-Mail	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	-
4	Apr	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1-2 hari
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Jun	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1-2 hari
7	Jul	2	Langsung (tatap muka)	2	-	-	-	1 hari

8	Ags	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1 hari
9	Sep	NIHIL						
Jumlah		9	-	6	-	3	-	-

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan					
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)	
1	Jan	1	-	-	1	-	-	
2	Feb	-	-	-	-	-	-	
3	Mar	-	-	-	-	-	-	
4	Apr	1	1	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	
6	Jun	1	1	-	-	-	-	
7	Jul	2	2	-	-	-	-	
8	Ags	1	1	-	-	-	-	
9	Sep	Nihil						

LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK (https://ptun-serang.go.id.)

Triwulan ke: III (Tiga) Tahun 2022

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	V		V		30-09-2022	<i>Link SIPP Update sesuai waktu server pusat</i>
- Buku Register Perkara	V		V		30-09-2022	<i>Link SIPP</i>
- Tahapan Penanganan Perkara	V		V		30-09-2022	<i>Link SIPP</i>
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai	V		V		11-07-2022	<i>Dok. Laporan Per Jan-Juni Tahun 2022</i>
- Statistik penjatuhan hukuman disiplin	V		V		11-07-2022	
- Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman		V		V		
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim	V		V		30-09-2022	<i>Laporan telah diupload</i>
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua	V			V		<i>Link JDIH</i>
- Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung	V			V		<i>Link JDIH</i>
- Hasil Penelitian yang dilakukan		V		-		<i>Tidak ada penelitian</i>
4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan	V			V		<i>SOP pada Website Menu Tentang Pengadilan, Sub Menu Kepaniteraan</i>
- Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	V			V		<i>Link PPID</i>
- Profil Hakim dan Pegawai	V		V		23-09-2022	<i>Terdapat penambahan 2 orang Hakim</i>
- Data Statistik Kepegawaian	V		V		23-09-2022	<i>Update penambahan personil</i>


LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK (<https://ptun-serang.go.id>)

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan						
Sejarah Pengadilan	V					<i>Tetap</i>
Profil Ketua	V					<i>Tetap</i>
Profil Pegawai	V		V		23-09-2022	<i>Update penambahan pegawai</i>
Struktur Organisasi	V		V		23-09-2022	<i>Update Pengurangan 1 orang Hakim</i>
Statistik Pengadilan	V		V			<i>Link SIPP pembaharuan disesuaikan dengan waktu server</i>
Wilayah Yurisdiksi	V					<i>Tetap</i>
Visi dan misi	V					<i>Tetap</i>
Tugas pokok dan fungsi	V					<i>Tetap</i>
Kegiatan pengadilan	V		V		30-09-2022	<i>Pemasangan Banner /popup tentang hari tahu sedunia</i>
Survey Pelayanan Publik	V		V			<i>Survei IKM dan IPK Triwulan III</i>
2. Pelayanan dasar Pengadilan						
Standar pelayanan Pengadilan	V					<i>Tetap</i>
SOP Penerimaan Gugatan	V					<i>Tetap</i>
Alur Pemeriksaan Persiapan	V					<i>Tetap</i>
Biaya perkara	V					<i>Tetap</i>
Jam kerja pelayanan publik	V					<i>Tetap</i>
Tata tertib persidangan	V					<i>Tetap</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala		Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
		Ada	Tidak	Ada	Tidak		
	Jadwal persidangan	V			V		<i>Update sesuai waktu server</i>
3. Informasi Terkait Hak Masyarakat							
	Prosedur pemberian layanan hukum	V					<i>Tetap</i>
	Prodeo	V					<i>Tetap</i>
	Posbakum	V					<i>Tetap</i>
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum	V		V		30-09-2022	<i>Update Laporan realisasi anggaran Posbakum bulan September 2022</i>
	Prosedur Permohonan informasi	V					<i>Tetap</i>
	Prosedur Keberatan informasi	V					<i>Tetap</i>
	Formulir Permohonan informasi	V					<i>Tetap</i>
	Formulir keberatan informasi	V					<i>Tetap</i>
	Tim pelaksana penanganan informasi	V					<i>Tetap</i>
	Pedoman Pengaduan	V					<i>Tetap</i>
	Prosedur Pengaduan	V					<i>Tetap</i>
	Hak Pelapor dan Terlapor	V					<i>Tetap</i>
	Formulir Pengaduan	V					<i>Tetap</i>
4. Sistem Informasi Perkara							
	Penelusuran perkara	V		V		30-09-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
	Direktori putusan	V		V		30-09-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
	Statistik perkara	V		V		30-09-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
5. Pengumuman							
	Lelang barang dan jasa secara elektronik	V			V		<i>Link LPSE Mahkamah Agung RI</i>
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah	V			V		<i>Tetap</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
Pengumuman lelang	V					<i>Tetap</i>
Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa		V				<i>Tidak ada informasi RUP Barang dan Jasa namun terdapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)</i>
6. Laporan Kinerja Pengadilan						
LKjIP	V			V		<i>LKjIP Tahun 2021 telah diupload</i>
Laporan Pelaksanaan Kegiatan	V			V		<i>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 telah diupload</i>
CALK	V			V		<i>Calk Tahun 2021 telah diupload</i>
PKT	V			V		<i>PKT Tahun 2021 telah diupload</i>
RKT	V			V		<i>RKT Tahun 2021 telah diupload</i>
IKU	V			V		<i>IKU Tahun 2021 telah diupload</i>
RAK	V			V		<i>RAK Tahun 2021 telah diupload</i>
7. Laporan Perkara						
Laporan jenis perkara	V		V		30-09-2022	<i>Update Terakhir Laporan Jenis Perkara Bulan September 2022</i>
Laporan keadaan perkara	V		V		30-09-2022	<i>Update Terakhir Laporan Keadaan Perkara Bulan September 2022</i>
Laporan tahunan	V					<i>Terdapat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021</i>
Laporan keuangan perkara	V		V		30-09-2022	<i>Update Terakhir Laporan Keuangan Perkara Bulan September 2022</i>
8. Transparansi keuangan						
Laporan Anggaran DIPA	V		V		30-09-2022	<i><u>Update Revisi Dipa yang telah dilaksanakan belum ada</u></i>
Laporan Realisasi Anggaran	V		V		30-09-2022	<i>LRA bulan September 2022</i>
Laporan PNBP	V		V		30-09-2022	<i>Update Terakhir Laporan PNBP Bulan September 2022</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
Statistik Keuangan	V		V		30-09-2022	Update Terakhir Laporan Statistik Keuangan Triwulan ke III Tahun 2022
9. Transparansi aset						
Laporan BMN	V					Tetap
Sarana dan prasarana	V			V		<u>Laporan KPB Smt I Tahun 2022 Belum Ada</u>
10 Transparansi kepegawaian						
Persyaratan usul menjadi PNS	V					Tetap
Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	V					Tetap
Persyaratan pengajuan ASKES/BPJS	V					Tetap
Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	V					Tetap
Persyaratan kenaikan Pangkat regular	V					Tetap
Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	V					Tetap
Persyaratan pengajuan pensiun	V					Tetap
Hukuman disiplin	V		V		10-06-2022	Update Dok. Laporan Per Jan-Juni Tahun 2022
11 LHKPN/LHKASN						
Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	V			V		LHKPN/LHKASN Tahun 2021 telah diupload



Serang, 20 Oktober 2022
Atasan IPID

NURHASANAH, S.H.
NIP. 196703081987032001

B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID

Berdasarkan hasil monitoring bahwa temuan-temuan pemenuhan informasi publik yang ditemui pada periode Triwulan ke-2 semuanya telah ditindaklanjuti dan terhadap hasil monitoring kegiatan layanan informasi publik periode Triwulan ke-3 ditemui hal sebagai berikut:

Pada kategori Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

1. Untuk informasi transparansi keuangan laporan anggaran DIPA yakni Revisi DIPA yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan ke-III belum diperbaharui.
2. Pada informasi transparansi aset pada Sarana dan Prasarana Laporan Kuasa Pengguna Barang (KPB) Semester 1 (satu) tahun 2022 belum diupload.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan informasi publik, untuk itu langkah-langkah evaluasi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap adanya informasi publik yang belum diadakan pembaharuan pada kategori Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan secara Berkala yakni pada transparansi keuangan laporan Revisi DIPA dan laporan Kuasa Pengguna Barang Semester 1 (satu) tahun 2022 untuk segera diperbaharui sesuai data terakhir.
2. Kepada stakeholder yang berkaitan dengan laporan hasil monitoring PPID yang ditemukan agar ditindaklanjuti dengan mengisi/melengkapi/memperbaharui data-data layanan informasi publik.
3. Jangka waktu penyelesaian Layanan informasi publik yang belum lengkap/terisi/diperbaharui adalah s.d. bulan pertama pada triwulan ke-IV (bulan Oktober 2022), sehingga pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi berikutnya tidak lagi ditemui.

BAB IV PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan IV tahun 2022 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

LAMPIRAN

**Foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID
Triwulan ke-III Tahun 2022
Oleh Atasan PPID**

